

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia.” Rajawali Pers, 2016, hlm. 75.
- . “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia.” Rajawali Pers, 2016, hlm. 78.
- Ahmad Pranata Adhi, R. Prasetyo, Budi Sujatmiko. Praktik Korupsi Birokrasi Di Indonesia: Perspektif Administrasi Negara. Yogyakarta: Gava Media, 2020, hlm. 89-91.
- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 45-47.
- . Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 12.
- . Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 18.
- Anwar. Hukum Militer Indonesia: Struktur, Wewenang, Dan Penegakan Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2022, hlm. 143.
- Andri Bagaskoro, Dina Khumaeroh. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Birokrasi Publik. Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 63.
- Amrizal Sutan Kayo. Audit Forensik: Penggunaan Dan Kompetensi Auditor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 27.
- Amrizal Sutan Kayo. Audit Forensik: Penggunaan dan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Pustaka Magister, 2016, hlm. 54.
- . Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Pustaka Magister, 2016, hlm. 56.
- Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.
- . “American Law: An Introduction, 2nd Ed.” W.W. Norton & Company, 1998, hlm. 20–27.
- . “Law and Society: An Introduction.” Prentice-Hall, 1977, hlm. 6–8.
- . “The Legal System: A Social Science Perspective.” Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 14–16.

- H. Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Indra Bastian. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Indriyanto Seno Adji. Korupsi Dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media, 2017, hlm. 98.
- Jonathan, dan A. Yusuf Saribu. Pengawasan Internal Dan Pencegahan Korupsi Di Lembaga Pemerintahan. Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 102104.
- Muhammad Abdul Kadir. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 39.
- Mulyadi. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2019, hlm. 134.
- Romli Atmasasmita. Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Satjipto Rahardjo. Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Hak Asasi. Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 72.
- . Ilmu Hukum, Cetakan Ke-8. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 189.
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 8-10.
- . Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51.
- Suryanata Lasmi, Roni, Dwi Hartanto. Korupsi Dalam Sistem Administrasi Publik. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 74.
- Sutedjo. Teknik Penyidikan Tindak Pidana Khusus. Yogyakarta: Andi Offset, 2021, hlm. 66.
- Wiyono R. Hukum Acara Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 112.

B. Peraturan Undang Undang

- Kitab Undang-Undang Republik Indonesia, Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tunjangan Kinerja Prajurit TNI AD.
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/743/XII/2024 tentang Petunjuk Administrasi Keuangan di Lingkungan TNI AD.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

C. Artikel/Karya Ilmiah

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Jakarta: BPKP, 2024).

B. Rahmasari dan N. Setiawan. "Determinasi Terjadinya Kecurangan Di Pemerintahan Daerah." *Jurnal Pemerintahan Dan Akuntabilitas* 5, no. 2 (2023), hlm. 88.

D. Pane. "Pengaruh E-Government Terhadap Probabilitas Terjadinya Korupsi Di Indonesia." *Diponegoro Journal of Accounting* 12, no. 3 (2023): 77.

F. Frendy, B. Pruyudo, dan Suratminingsih. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan." *Jurnal Audit, Pajak, Dan Akuntansi Publik (AJIB)*, hlm. 23.

F. T. Handayani. "Pengaruh Sistem Merit Pay Terhadap Keadilan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Daerah." *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 2 (2023): 66.

Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Laporan Kinerja Penanganan Perkara 2021–2023 (Bengkulu: Kejaksaan Tinggi Bengkulu 2024).

Markas Besar TNI Angkatan Darat, Sejarah Kodam II/Sriwijaya (Palembang: Kodam II/Sriwijaya, 2015), hlm. 45.

M. Yusuf, R. Din, dan M. Jurana. "Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia." *Jurnal Sains Akuntansi Dan Bisnis* 9, no. 1 (2024): 59.

- Riri Tri Mayasari, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*.
- S. Kamaruddin dan Afandi. "Analisis Kebijakan Anti-Korupsi: Studi Open Government Di Indonesia." *KnE Social Sciences*, 2022, hlm. 214.
- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, *Sejarah Perkembangan Komando Teritorial TNI AD* (Jakarta: Dinas Sejarah TNI AD, 2012), hlm. 78.
- Wagianto. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 50, no. 6 (2017): 211.
- Wawancara Dengan Dika Purmadi, Pejabat Hukum Yang Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Korem 041/Gamas, Bengkulu.
- Wawancara Dengan Iwan Setiawan, Mengenai Dugaan Manipulasi Data Pembayaran Tunjangan Kinerja Serta Praktik Markup Nilai Pembayaran, Bengkulu.
- Wawancara Dengan Arief Wirawan, Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, 2026.
- Wawancara Dengan Novita Dan Meilina Simatupang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, 2026.
- W. K. Assanti. "Kebijakan Diskresi Dalam Lembaga Layanan Publik Rumah Sakit Di Indonesia: Tantangan Tata Kelola Dan Mekanisme Pengendalian." *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 6, no. 1 (2024): 41.

LAMPIRAN



Gambar 1.

Dokumentasi kegiatan wawancara dengan Mayor CKU (Corps Keuangan) Pewira Keuangan Iwan Setiawan pejabat pengelola administrasi keuangan di lingkungan Korem 041/Gamas terkait mekanisme pengajuan data pembayaran tunjangan kinerja serta proses penyusunan administrasi keuangan.



Gambar 2.

Dokumentasi kegiatan wawancara dengan Kapten CKH (Corps Hukum) Pewira Hukum Dika Purmadi S.H. pejabat hukum di lingkungan Korem 041/Gamas yang memberikan penjelasan mengenai mekanisme administrasi keuangan serta prosedur pengelolaan tunjangan kinerja prajurit TNI.



Gambar 3.

Dokumentasi kegiatan wawancara dengan Dr. Arief Wirawan. Kepala Seksi Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang memberikan keterangan terkait mekanisme penanganan perkara serta proses penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan tunjangan kinerja di lingkungan Korem 041/Gamas



Gambar 4.



Gambar 5.

Dokumentasi kegiatan wawancara dengan Novita, S.H. dan Meilina Simatupang, S.E., S.H. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam rangka memperoleh informasi mengenai proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan tunjangan kinerja di lingkungan Korem 041/Garuda Emas.